

# Plagiarism Detector v. 1872 - Originality Report 14/07/2021 20:54:54

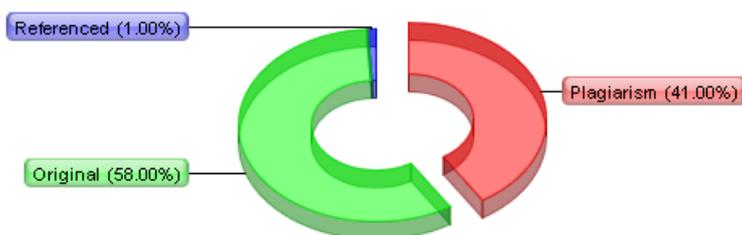
Analyzed document: 228-1119-1-SM.docx Licensed to: JPKMI

Comparison Preset: Rewrite Detected language:

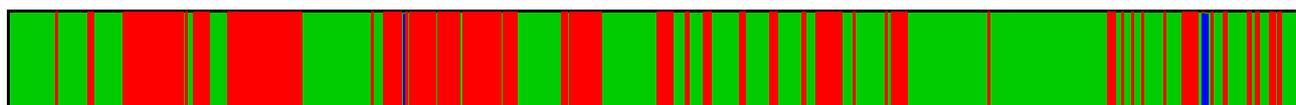
Check type: Internet Check

Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 81

13%	487	1. <a href="https://123dok.com/document/qoom100q-gubernur-bali-peraturan-gubernur-bali-nomor-tahun.html">https://123dok.com/document/qoom100q-gubernur-bali-peraturan-gubernur-bali-nomor-tahun.html</a>
11%	419	2. <a href="https://docplayer.info/203308251-Gubernur-sulawesi-selatan-peraturan-gubernur-sulawesi-selatan-nomor-84-tahun-2020-tentang-pramuwisata-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa.html">https://docplayer.info/203308251-Gubernur-sulawesi-selatan-peraturan-gubernur-sulawesi-selatan-nomor-84-tahun-2020-tentang-pramuwisata-dengan-rahmat-tuhan-yang-maha-esa.html</a>
9%	313	3. <a href="https://jdih.baliprov.go.id/uploads/forum/RAPERDA_TENTANG_STANDAR_PENYELENGGARAAN_KEPARIWISATAAN_BALI.p">https://jdih.baliprov.go.id/uploads/forum/RAPERDA_TENTANG_STANDAR_PENYELENGGARAAN_KEPARIWISATAAN_BALI.p</a>

Processed resources details: 138 - Ok / 19 - Failed

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
[not detected]	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Active References (Urls Extracted from the Document):

No URLs detected

Excluded Urls:

No URLs detected

Included Urls:

No URLs detected

 Detailed document analysis:

Tata Kelola Pramuwisata Khusus

Sebagai Bentuk Pelibatan Masyarakat Lokal

Ely Triasih Rahayu

1, Bagus Reza Hariyadi<sup>2</sup>, Hartati<sup>3</sup>, Anggita Stovia<sup>4</sup>, Anak Agung Ayu Dian Andriyani<sup>5</sup>,  
1,2,3,4

Fakultas Ilmu Budaya , Universitas Jenderal Soedirman<sup>5</sup>

Fakultas Bahasa Asing Universitas MahasaraswatiEmail

: ely.rahayu@unsoed.ac.id<sup>1</sup>\*ABSTRAK

Adanya regulasi Dinas Pariwisata Propinsi Bali mengenai kebijakan pengkategorian pramuwisata umum dan khusus menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan yang muncul adalah makin berkembangnya pramuwisata ilegal (non formal) yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Pramuwisata illegal tidak hanya dilakukan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan berbahasa asing, tetapi juga dilakukan oleh wisatawan asing yang sudah mengenal pariwisata Bali karena sering melakukan kunjungan ke Bali. Permasalahan yang lain adalah tidak adanya pelimpahan tugas dari pramuwisata umum ke khusus. Pramuwisata umum di Bali adalah pramuwisata yang bekerja di tingkat provinsi, sedangkan

 **Plagiarism detected: 0,14%**

id: 1

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/13014/...>  
pramuwisata khusus adalah pramuwisata yang

bekerja di daerah tujuan wisata di tingkat kabupaten. Penyebab permasalahan ini karena tidak adanya regulasi yang berupa peraturan Bupati untuk mengatur pramuwisata khusus. Di Bali terdapat Peraturan Daerah

No. 5 Tahun 2016 yang mengatur pramuwisata secara umum, tetapi di tingkat kabupaten belum dilakukan kajian pramuwisata khusus sehingga pembagian kerja antara pramuwisata umum dan khusus tidak jelas. Ketidakjelasan inilah yang menyebabkan banyak permasalahan yang muncul terutama di daerah tujuan wisata tingkat kabupaten. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melakukan pengabdian di kabupaten Bangli dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini

 **Plagiarism detected: 0,58%** <https://fpar.unud.ac.id/img/uploads/2014/03/Jurnal->

id: 2

[Pariwisata](#)  
merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kontribusi besar bagi income daerah pada sektor pariwisata. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang

siap menelaah Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tersebut untuk dapat diturunkan menjadi peraturan Bupati Bangli mengenai tata kelola pramuwisata khusus. Tujuan PKM ini adalah untuk menginventarisir exciting condition dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Hasil dari inventarisir ini dijadikan dasar pembuatan model tata kelola pramuwisata khusus. Model tata kelola pramuwisata diusulkan kepada Bupati Bangli sebagai dasar pembuatan peraturan Bupati tentang pramuwisata khusus. Kata Kunci: Pariwisata, Pramuwisata Khusus, Tata Kelola, Desa Wisata

PENDAHULUAN

Prospek kepariwisataan

 **Plagiarism detected: 5,33%** <https://kemenparekraf.go.id/laporan-kegiatan/Lap...> + 12

id: 3

[resources](#)  
dalam kerangka pembangunan nasional, memberikan dorongan dan keharusan akan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara yang semakin merata serta minat investasi yang semakin tinggi di Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh pada nilai manfaat ekonomi yang didorong oleh sektor pariwisata. Pariwisata akan berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat devisa yang disumbangkan dari sektor pariwisata Indonesia tahun 2018 tembus US\$ 19,29 miliar atau hampir mencapai target US\$ 20 miliar yang dicanangkan Presiden Jokowi tahun di 2019. Data itu berasal dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) berdasarkan BPS, tahun 2018 ditutup dengan angka capaian 15,8 juta. Lalu spending atau belanja mereka selama berwisata dan berada di tanah air sebesar US\$ 1.220 per kepala per kunjungan atau ASPA (average spending per arrival).

Angka spending US\$ 1.220 per visit itu sudah gabungan antara wisman dari 19 pintu utama imigrasi sejumlah 13,3 juta wisman, plus 2,71 juta wisman dari pintu lainnya, termasuk dari festival festival cross border. Maka totalnya adalah 15.81 juta wisman dan average-nya US\$ 1.220

 **Plagiarism detected: 0,19%** <https://kemenparekraf.go.id/laporan-kegiatan/Lap...> + 2

id: 4

<https://www.kemenparekraf.go.id/>  
[https://www.kemenparekraf.go.id](https://www.kemenparekraf.go.id/)

).

Bali merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata yang memiliki kompetensi sebagai heritage and pilgrim Tourims .

 **Plagiarism detected: 1,44%** <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456...> + 8 id: 5

Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009, kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Pengembangan pariwisata Bali berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Bali serta sistem berkomunikasi yang terbuka dan ramah sebagai ciri khas dari interaksi yang dimiliki masyarakat Bali (Andriyani; Djatmika; Sumarlam & Rahayu, 2019). Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2019,

 **Plagiarism detected: 7,32%** <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2018/12/03/717...> + id: 6

wisatawan mancanegara (wisman) yang datang langsung ke Provinsi Bali November 2019 tercatat sebanyak 498.088 kunjungan, dengan wisman yang datang melalui bandara I Gusti Ngurah Rai sebanyak 493.067 kunjungan, dan yang melalui pelabuhan laut sebanyak 5.021 kunjungan. Jumlah wisman ke Provinsi Bali pada bulan November 2019 turun sedalam -12,32 persen dibandingkan dengan catatan bulan Oktober 2019 (m to m). Bila dibandingkan dengan bulan November 2018 (y on y), jumlah wisman ke Bali tercatat meningkat setinggi 22,46 persen. Wisman dengan kebangsaan Australia (21,14 persen), Tiongkok (15,76 persen), India (6,90 persen), Amerika Serikat (4,60 persen), dan Inggris (4,13 persen) adalah yang tercatat paling banyak datang ke Bali pada bulan November 2019. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang bulan November 2019 tercatat sebesar 59,46 persen, turun -3,84 poin dibandingkan TPK bulan sebelumnya (m to m) yang tercatat sebesar 63,30 persen. Jika dibandingkan bulan November 2018 (y on y) yang mencapai 55,92 persen, tingkat penghunian kamar di bulan November 2019, tercatat naik setinggi 3,54 poin.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Bali pada bulan November 2019 tercatat selama 2,71 hari, turun -0,15 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada bulan Oktober 2019 (m to m) yang tercatat selama 2,86 hari. Jika dibandingkan dengan bulan November 2018 (y on y) yang tercatat selama 3,04 hari, rata-rata lama menginap November 2019 turun sedalam -0,33 poin. (Sumber: [www.bali-airport.com](http://www.bali-airport.com), 2020)

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Wisatawan Mancanegara dari Sepuluh

Besar Negara Penyumbang Wisman ke Provinsi Bali

Selama Tahun 2019 Permasalahan yang timbul dalam upaya peningkatan pariwisata di Bali adalah mengenai pramuwisata yang berjumlah kurang lebih 900 pramuwisata dengan dua kategori yaitu pramuwisata umum (di tingkat provinsi) dan pramuwisata khusus (lokal) di tingkat kabupaten. Permasalahan yang muncul adalah makin berkembangnya pramuwisata legal (non formal) yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTPP). Minimnya jumlah pramuwisata yang mampu berbahasa Jepang juga menjadikan kendala dalam penerjemahan destinasi wisata. Biro Perjalanan Wisata (BPW) pun mulai mempekerjakan native speaker dari luar dengan status visa wisata. Upaya Dinas Pariwisata Provinsi dengan membentuk satgas dalam menertibkan pramuwisata illegal (non formal) dirasa kurang maksimal. Permasalahan pramuwisata dirasakan juga di desa wisata Kabupaten Bangli. Saat ini kabupaten Bangli sangat membutuhkan kebijakan tata kelola bagi pramuwisata di desa wisatanya. Pramuwisata yang bekerja di desa wisata merupakan pramuwisata khusus yang mendapatkan tugas limpahan dari pramuwisata umum. Pramuwisata umum biasanya bekerja di sektor wisata tingkat provinsi. Tupoksi pramuwisata umum dan khusus adalah sama yaitu sebagai pemandu wisata. Pramuwisata umum seharusnya melimpahkan tugasnya saat pemanduan wisata beralih ke desa wisata. Bangli telah menyiapkan pramuwisata khusus yang bertanggung jawab pada pemanduan di tingkat daerahnya. Tujuannya adalah selain untuk

 **Plagiarism detected: 0,22%** <https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/4...> + 2 id: 7

melibatkan peran partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata

di daerahnya, juga bertujuan agar pemanduan wisata lebih terarah karena materi wisata di daerah lebih dikuasai oleh pramuwisata khusus atau lokal. Berkaitan dengan pelibatan

masyarakat, partisipasi masyarakat

 **Plagiarism detected: 1,57%** <https://123dok.com/document/yr0vjo8y-pengelola...> + 2 id: 8

tidak hanya merupakan kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal secara cuma-cuma, untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan melainkan sebagai suatu keterlibatan secara aktif dalam setiap proses (Drake dan Susan, 1991 dalam Pitana dan Gayatri, 2002). Peran aktif yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan penikmat hasilnya atau yang dikenal dengan

 **Referenced: 0,06% in:** id: 9

"genuine participation"

 **Plagiarism detected: 0,11%** <https://123dok.com/document/yr0vjo8y-pengelola...> + 2 id: 10

atau dengan kata lain

masyarakat sebagai pelaku pariwisata (Slamet, 1993). Pengembangan pariwisata di Bali

 **Plagiarism detected: 2,07%** <https://fpar.unud.ac.id/img/uploads/2014/03/Jurnal...> + 4 id: 11

membuka kesempatan bagi perempuan untuk menempati berbagai profesi, dapat dilihat dari keberadaan tenaga kerja perempuan dalam berbagai segmen industri pariwisata di antaranya : public relation, sales and marketing, house keeping, front office, ticketing, pramusaji, dan pramugari. Hal ini karena perempuan dipandang lebih telaten, rapi, hati-hati dan efisien dalam melakukan pekerjaan (Pendit, 2001). Dengan bervariasi usaha jasa pariwisata, tentulah memberi kesempatan kepada perempuan untuk bekerja dengan sistem penggal/paruh waktu serta usaha yang dilakukan lebih banyak mendekati sektor informasi (Utarini,

2005).

 **Plagiarism detected: 1,77%** <https://fpar.unud.ac.id/img/uploads/2014/03/Jurnal...> + 5 id: 12

Motivasi wanita sebagai pengelola pondok wisata dikaitkan dengan pendapat (Fromm, 1996, dalam Bawa, 2004), terkait dengan suatu harapan, yakni harapan kehidupan yang lebih baik, harapan memiliki apa yang dinilai lebih bermakna bagikehidupannya. Selain itu, adanya harapan terbebas dari kejenuhan seperti ingin mengembangkan dan mengaplikasikan diri sesuai kemampuan atau spesialisasi, ingin meningkatkan pendapatan keluarga, juga untuk mengatasi ketimpangan status sehingga dalam keluarga ia tidak dipandang rendah.

 **Plagiarism detected: 2,9%** <https://www.researchgate.net/publication/3277971...> + 3 id: 13

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Dalam rangka mengembangkan sebuah destinasi pariwisata, seorang perencana (tourism planner) paling tidak harus memperhatikan dua lingkup pengembangan yang saling melengkapi, yaitu lingkup pengembangan spasial dan tingkatan pengembangan dari destinasi tersebut (Getz, 1986). Lingkup pengembangan spasial adalah keharusan untuk memahami dan memperhatikan latar belakang kontekstual atau lingkungan makro dari destinasi yang akan dikembangkan (Rangkuti 2017). Sedangkan tingkatan pengembangan destinasi yang dimaksud adalah cara pandang atau perspektif perencanaan pengembangan destinasi yang harus berpandangan secara holistik dan menyeluruh (Sunaryo, 2013

).

 **Plagiarism detected: 1,05%** <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/13910610...> + 2 id: 14

Pembangunan Kepariwisata Budaya Bali diarahkan untuk: meningkatkan harkat dan martabat, serta memperkuat jati diri masyarakat Bali; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan; dan melestarikan lingkungan alam Bali sebagai basis penyangga kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali secara berkelanjutan.

Sebagai ikon dan konfigurasi pariwisata Indonesia, Bali telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang sangat populer. Pariwisata telah menjadi generator penggerak pembangunan perekonomian masyarakat Bali. Berbagai dampak pariwisata juga telah dirasakan oleh masyarakat Bali. Tekanan terhadap lingkungan akibat pembangunan fisik semakin besar. Tidak adanya pelimpahan tugas yang jelas dari pramuwisata umum ke khusus juga membutuhkan adanya aturan yang jelas. Pada desa wisata Bangli masih terdapat pramuwisata umum yang melakukan pemanduan wisata. Akibatnya penyampaian destinasi wisata kepada

wisatawan kurang maksimal bahkan dimungkinkan terjadi kesalahan pemanduan karena informasi mengenai desa wisata lebih dipahami oleh pramuwisata khusus. Secara yuridis pembangunan kepariwisataan provinsi Bali memiliki ketentuan regulasi kepariwisataan. Berikut peraturan perundangan yang mengatur pramuwisata di Bali.

 **Plagiarism detected: 0,61%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 4 id: 15

resources!  
Peraturan Gubernur nomor 41 tahun 2009 mengatur tentang tata cara mendapatkan sertifikat pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTP) dan penggunaan pakaian adat Bali.

 **Plagiarism detected: 1,85%** <https://docplayer.info/203308251-Gubernur-sulaw...> + 15 id: 16

resources!  
Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 yang mengatur tentang standar usaha jasa pramuwisata. Aturan ini menyatakan perlunya Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata demi peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha jasa pramuwisata. Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata bertugas membuat Sertifikat Usaha Jasa Pramuwisata Pariwisata kepada Pemilik Usaha Jasa Pramuwisata yang telah memenuhi Standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 **Plagiarism detected: 0,75%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 4 id: 17

resources!  
Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2016 tentang pramuwisata menjelaskan bahwa pramuwisata merupakan salah satu komponen penting dalam jasa pariwisata yang sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan

dan citra pariwisata secara keseluruhan. Maka dari itu perlu penertiban dan peningkatan kualitas pramuwisata terutama tentang penguasaan pengetahuan kebudayaan Bali. Sehingga tugas pramuwisata tidak hanya sebatas memandu tetapi juga sekaligus mendidik wisatawan. Dari sejumlah peraturan tersebut masih belum ditemui peraturan yang mengatur pramuwisata khusus/lokal. Kebijakan adanya pembagian pramuwisata umum di tingkat provinsi dengan tupoksi melakukan pemanduan di daerah tujuan wisata tingkat provinsi termasuk bertanggung jawab dari penjemputan sampai pengantaran ke desa wisata, serta adanya pramuwisata khusus/lokal yang bertanggung jawab mengambil alih tugas pemanduan dari umum ke desa wisata, menimbulkan permasalahan yang harus dicermati secara perundang undangan. Desa wisata membutuhkan keterlibatan masyarakat lokal untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kepariwisataan yang ada di daerahnya. Dengan demikian harus ada regulasi yang mengatur kompetensi pemanduan yang professional. Berdasarkan hal ini maka perlu adanya kegiatan PKM sebagai mediator dalam pengujian

 **Plagiarism detected: 1,16%** <https://jdih.banglikab.go.id/produk-hukum/5> + 2 id: 18

resources!  
tata kelola pramuwisata khusus bentuk langkah awal memperbaiki aktifitas pemanduan dan pemberian servis pada wisatawan. Tujuannya adalah untuk mendukung program pengembangan wisata khususnya di tingkat lokal sebagai strategi memaksimalkan keterlibatan masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat lokal pun meningkat. TATA KELOLA PRAMUWISATA KHUSUS

#### KABUPATEN BANGLI

Regulasi yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Bali mengenai tata kelola pramuwisata menunjukkan komitmen pemerintah daerah provinsi untuk melakukan penataan secara manajemen bagi para pramuwisata. Pada kenyataannya dengan diterbitkannya regulasi Peraturan Daerah

 **Plagiarism detected: 0,52%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 3 id: 19

resources!  
nomor 5 tahun 2016, tidak menyurutkan permasalahan yang ada pada hal pemanduan. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun

2016 mengatur pramuwisata yang bekerja di tingkat provinsi. Peraturan Daerah memberikan peluang pada para Bupati untuk membuat turunan regulasi pada pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 yaitu; Bupati/Walikota menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus

 **Plagiarism detected: 0,64%** id: 20

resources!  
[https://jdih.baliprov.go.id/uploads/forum/PAPERDA\\_TENTAN](https://jdih.baliprov.go.id/uploads/forum/PAPERDA_TENTAN)  
setelah melakukan koordinasi dengan Gubernur. Ketentuan mengenai standar jasa pelayanan Pramuwisata Khusus diatur oleh Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai Pramuwisata khusus diatur oleh Bupati/ Walikota.

Pada Peraturan Daerah di atas, sangatlah jelas bahwa Gubernur Provinsi Bali menyerahkan tata kelola pramuwisata khusus kepada

Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Peraturan Bupati sebagai turunan dari Peraturan Daerah untuk memberikan kebijakan pada pemanduan khusus bukan merupakan suatu kewajiban melainkan suatu kebutuhan tiap Kabupaten. Pramuwisata khusus akan memiliki power saat wisatawan berkunjung di daerah wisata kabupaten. Perlu disepakati batas pelimpahan tugas sebagai bentuk pelimpahan tugas dari pramuwisata umum ke khusus. Tahap awal dari pengkategorian tugas dari pramuwisata adalah

 **Plagiarism detected: 0,58%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 3 id: 21

resources!  
penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus. Di tingkat provinsi, pramuwisata umum harus mengikuti serangkaian test untuk mendapatkan kartu tanda pengenal pramuwisata.

Test diberikan mengacu pada persoalan pemanduan di tingkat provinsi, misalnya mengenai objek wisata provinsi. Di tingkat kabupaten, perlu dilakukan test bagi pramuwisata khusus dengan lingkup permasalahan yang ada di daerah tujuan wisata kabupaten. Test di tingkat provinsi diberikan oleh Dinas Pariwisata Tingkat Provinsi Bali, sedangkan di tingkat kabupaten pembuatan soal diserahkan pada Dinas Pariwisata tingkat Kabupaten. Pramuwisata yang telah lolos pada test di tingkat kabupaten akan mendapatkan

 **Plagiarism detected: 0,75%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 5 id: 22

resources!  
Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus yang diterbitkan oleh Bupati. Pramuwisata Khusus dalam melaksanakan tugas kepemanduan wisata di Daerah Tujuan Wisata, wajib menggunakan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus

sesuai dengan tempat Pramuwisata Khusus bertugas. Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang sangat menghargai budayanya. Di Bali tidaklah sulit untuk menemukan rumah penduduk yang masih melestarikan ciri tradisional Bali. Demikian juga dari segi pakaian tradisional. Di daerah wisata banyak ditemui pramuwisata yang menggunakan pakaian adat Bali. Hal ini tentu akan memberikan kesan baik bagi wisatawan. Pramuwisata harus memperhatikan penampilannya agar terlihat menarik. Menarik artinya

 **Plagiarism detected: 0,44%** <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456...> + 4 id: 23

resources!  
tidak berlebihan dalam berpenampilan. Biasanya pemandu yang berpenampilan menarik, unik, bersih, dan menyenangkan akan disukai wisatawan.

Pramuwisata berpakaian adat Bali tertuang dalam Peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 dengan rumusan sebagai berikut.

 **Plagiarism detected: 1,99%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 5 id: 24

resources!  
Kewajiban Pramuwisata dalam kepemanduan wisatawan meliputi:  
Mengenakan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus; Mengenakan Pakaian Adat Bali. Mengantarkan wisatawan, baik rombongan maupun perorangan yang mengadakan kunjungan ke Daerah Tujuan Wisata; Memberikan penjelasan dan petunjuk tentang Daerah Tujuan Wisata yang dikunjungi; Dalam hal wisatawan tidak didampingi oleh pramuwisata umum, pramuwisata khusus membantu menguruskan barang bawaan wisatawan dan membantu keperluan wisatawan di Daerah Tujuan Wisata; Memberikan pertolongan kepada wisatawan yang sakit, mendapat kecelakaan, kehilangan atau musibah

di Daerah Tujuan Wisata; Bekerja

sama dengan pramuwisata umum. Dinas Pariwisata yang menaungi para pramuwisata perlu melakukan pembinaan dan pengawasan. Di tingkat Kabupaten, Bupati perlu menunjuk Dinas

 **Plagiarism detected: 0,17%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 2 id: 25

resources!  
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pramuwisata

Khusus.

Pembinaan berupa pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pramuwisata Khusus. Pelaksanaan pengawasan akan lebih mengena bila Dinas yang ditunjuk Bupati melakukan pemantauan langsung ke daerah wisata tempat pramuwisata khusus melakukan pemanduan. Hal ini akan memberikan informasi yang riil tentang kinerja pramuwisata khusus sekaligus dapat memahami tingkat kepuasan wisatawan. Perlu ada sanksi dengan aturan tertulis untuk menangani pramuwisata yang tidak menjalankan pemanduan secara benar. Sanksi secara administrasi dapat berupa; Teguran lisan;

Teguran tertulis;

Pembekuan

 **Plagiarism detected: 0,3%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 2 id: 26

resources!  
kartu tanda pengenal pramuwisata khusus; dan/atau

Pencabutan Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata Khusus.

Kepariwisataan Bali berkembang berdasarkan kepariwisataan

 **Plagiarism detected: 1,19%** <https://jdih.baliprov.go.id/uploads/forum/RAPERD...> + 4 id: 27

**resources!**  
budaya. Kepariwisataan budaya Bali adalah kepariwisataan yang berlandaskan kepada ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.

Konsep Tri Hita Karana (THK) sesuai dengan Kode Etik Pariwisata Dunia yang dikembangkan World Tourism Organization (WTO), yakni pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan hubungan interaksi antar manusia dengan manusia, dengan lingkungan, dan dengan budaya. Melalui konsep ini diharapkan kegiatan pariwisata dapat terbagi secara merata di semua lapisan sektor masyarakat dan tercipta pariwisata yang berkelanjutan. Berkaitan dengan konsep Tri Hita Karana, seorang pramuwisata khusus wajib memahami isi dan falsafah ini. Sehingga pariwisata Bali memiliki kewibawaan secara religi yang wajib dihormati oleh para wisatawan khususnya dari manca negara. Baru baru ini ada berita mengenai seorang turis yang mencuci badannya di tempat yang selayaknya sebagai tempat air suci. Hal ini tentu menyinggung kepercayaan masyarakat Bali. Oleh karena itu pramuwisata perlu diberi edukasi mengenai falsafah Tri Hita Karana dan perlu dilakukan test pemahaman pramuwisata mengenai falsafah yang menjadi ciri khas masyarakat Bali ini. Pramuwisata saat melakukan pemanduan selain memberi penjelasan mengenai objek wisata, perlu juga menjelaskan secara falsafah dari objek wisata tersebut. Hal ini akan meminimalkan permasalahan yang sering terjadi karena ketidaktahuan wisatawan terhadap objek yang seharusnya diperlakukan secara ritual. Berdasarkan tata kelola pramuwisata khusus us yang telah diuraikan di atas berikut bagan model tata kelola pramuwisata khusus: Gambar 2. Model tata Kelola Pramuwisata Khusus Bagan model tata kelola pramuwisata umum dan khusus menunjukkan tingkatan wewenang pengaturan pramuwisata. Pada level provinsi, pemerintah daerah tingkat provisi bermitra dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia dalam mengelola pramuwisata

 **Plagiarism detected: 0,17%** <https://mainkesanakemari.blogspot.com/> id: 28

umum. Sebagian besar wisatawan datang ke

daerah tujuan wisata menggunakan biro perjalanan wisata atau regional tourism organization. Biro perjalanan wisata mempekerjakan para pramuwisata untuk memandu wisatawan, sehingga pramuwisata melakukan pekerjaannya di bawah biro perjalanan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tingkat provinsi haruslah bersinergi dengan biro perjalanan wisata. Pada level kabupaten, pemerintah daerah tingkat kabupaten bersinergi dengan tourism-aware group regency yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pariwisata. Dalam hal pelimpahan pekerjaan pemanduan dari pramuwisata umum ke khusus, dilakukan saat wisatawan masuk ke daerah tujuan wisata kabupaten/pokdarwis. Pada ranah ini pramuwisata umum cukup mengantarkan di pintu masuk daerah wisata kabupaten, untuk selanjutnya pemanduan wisata diserahkan pada pramuwisata khusus. Perlu adanya koordinasi dan monitoring sistem oleh dinas pariwisata. Hasil dari kordinasi dan monitoring dijadikan dasar evaluasi sekaligus strategi pengembangan pariwisata.

**SIMPULAN** Tata kelola pramuwisata khusus kabupaten Bangli merupakan tata kelola yang disusun berdasarkan kajian pemanduan wisata yang dilakukan oleh pramuwisata baik di tingkat provinsi Bali maupun di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi Bali terdapat peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 yang memberikan regulasi bagi pramuwisata dalam menjalankan pemanduan secara profesional. Permasalahan yang muncul dari peraturan daerah ini adalah tidak adanya turunan di tingkat kabupaten sebagai regulasi khusus bagi pelaksanaan pemanduan di daerah tujuan wisata kabupaten. Kajian tata kelola ini disusun sebagai dasar pembuatan peraturan bupati kabupaten Bangli mengenai pramuwisata khusus. Model Tata Kelola Pramuwisata memberikan acuan pelaksanaan pemanduan pariwisata dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten. Adanya pelimpahan tugas dari pramuwisata umum ke khusus menunjukkan adanya penataan tugas dan wewenang pramuwisata khusus. Selain itu sebagai tanda pengenal bagi pramuwisata khusus perlu adanya test kopetensi pemanduan tingkat kabupaten. Di bidang kemampuan bahasa asing perlu adanya pembinaan bahasa asing mengingat banyaknya pramuwisata illegal dari orang asing dengan alasan kemampuan bahasa asing dari pramuwisata yang masih rendah. Pelestarian kearifan lokal masyarakat Bali ditunjukkan dengan penggunaan pakaian adat saat melaksanakan pemanduan. Pemanduan pariwisata juga tetap mengangkat filosofi masyarakat Bali yang tercermin pada filosofi Tri Hita

Kirana.

## DAFTAR PUSTAKA

-  **Plagiarism detected: 1,05%** <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/artic...> + id: **29**  
resources!
- Andriyani, A. A. D., Djatmika, D., Sumarlam, S., & Rahayu, E. T. (2019). Pengaruh Lintas Budaya Tingkat Tegur Hormat Keigo melalui Media Sosial antara Driver Guide dan Wisatawan Jepang di Bali. MOZAIK HUMANIORA, 19(1), 1-17.
- Bawa, I Wayan, I Wayan Cika. 2004. Bahasa Dalam Perspektif Kebudayaan. Bali: Universitas Udayana
-  **Plagiarism detected: 0,33%** <http://abcreorg.weebly.com/uploads/9/9/8/2/9982...> + 2 id: **30**  
resources!
- Blaxter, et.al. (2006). How To Research. Buckingham : Open University Press.
- Cole, Stroma, 2008. Tourism, Culture and Development: Hopes, Dreams and Realities in East Indonesia. Clevedon: Cromwell Press.
-  **Plagiarism detected: 0,25%** id: **31**  
[http://repository.unika.ac.id/4218/6/98\\_81\\_0019%30Antonius%...](http://repository.unika.ac.id/4218/6/98_81_0019%30Antonius%...)
- Cooper, Chris, et. Al. (1998). Tourism Principles and Practice (2nded). London: Prentice Hall.
- Damanik, Janianton Dan Weber, Helmut F. (2006). Perencanaan Ekowisata. Yogyakarta : Pusbar Ugm & Andi Yogyakarta
- a.
-  **Plagiarism detected: 0,19%** [http://eprints.undip.ac.id/46979/8/LUTHFIA\\_MA...](http://eprints.undip.ac.id/46979/8/LUTHFIA_MA...) + 2 id: **32**  
resources!
- Damardjati. R.S. 1995. Istilah-istilah Dunia Pariwisata. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta
- Drake, Susan P. 1991. Local Participation in Ecotourism Projects in Whelan, T. (ed). Nature Tourism: Managing for the Environment. Washington DC: Island Press
- Getz, D. 1986. Models in tourism planning towards integration of theory and practice. Tourism Management 7 (1), 21-32
- Ismayanti. (2010). Pengantar Pariwisata. Jakarta : PT. Gramedia Widisarana
- Indonesia.Kementerian Pariwisata. (2015).
-  **Plagiarism detected: 0,19%** <https://kemenparekraf.go.id/laporan-kegiatan/Lap...> + 3 id: **33**  
resources!
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2015. Jakarta : Kementerian Pariwisata.
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. (1985). Naturalistic Inquiry. California : Sage.
- Moleong, Lexy. (1989). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Karya.
- Murphy, Peter E. 1985. Tourism : A Community Approach. University Paperbacks : Methuen.
- MPR RI. (1978). GBHN Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
-  **Plagiarism detected: 1,55%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 12 id: **34**  
resources!
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Pramuwisata. Pergub nomor 41 tahun 2009 tentang Tata Cara Mendapatkan Sertifikat Pramuwisata, Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata (KTTP) dan Penggunaan Pakaian Adat Bali
-  **Plagiarism detected: 0,11%** <https://www.researchgate.net/publication/3433808...> + 2 id: **35**  
resources!
- Pitana, I.G., 2002.
-  **Referenced: 0,55% in:** id: **36**
- "Kebijakan dan Strategi Pemerintah Daerah Bali dalam Pembangunan Pariwisata. Pada Seminar Nasional Pariwisata Bali the Last or the Lost Paradise".
-  **Plagiarism detected: 0,19%** <https://www.researchgate.net/publication/3433808...> + 2 id: **37**  
resources!
- Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan. Denpasar: Universitas Udayana.
- Pitana, IG & Gayatri, PG. (2005). Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Purwaningsih, Ratih Melatsiwi. (2012). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pemandu Wisata terhadap Kepuasan Wisatawan di Candi Prambanan. Tesis.
-  **Plagiarism detected: 0,39%** <https://fpar.unud.ac.id/img/uploads/2014/03/Jurnal...> + 5 id: **38**  
resources!
- Yogyakarta.Rangkuti, Freddy. 2017. Analisis SWOT-Teknik Membedah Kasus Bisnis. PT Gramedia

Pustaka Utama. Jakarta.

Santosa, Budi (2007). Data Mining Teknik Pemanfaatan Data untuk Keperluan Bisnis. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sharpley. 1994. Tourism, Tourism and Society. Huntingdom: ELM Publication

Sinclair, M. Thea. (1998). Tourism and Economic Development : A Survey, The Journal of

Development Studies 34.5 (June 1998). Slamet, Y. 1993. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi. Surakarta: Sebelas Maret University Press

 **Plagiarism detected: 0,47%** <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456...> + 2 id: **39**

resources!

Surat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Nomor : KM. 82/PW. 102/MPPT-88 tentang Pramuwisata dan Pengatur Wisata.

 **Plagiarism detected: 0,14%** <https://fpar.unud.ac.id/img/uploads/2014/03/Jurnal-> id: **40**

Pariwisata-

Suwantoro, Gamal. 2004. Dasar-dasar Pariwisata.

Penerbit Andi Yogyakarta

 **Plagiarism detected: 0,25%** <https://fpar.unud.ac.id/img/uploads/2014/03/Jurnal...> + 5 id: **41**

resources!

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Utarni, Adi. 2005. Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Simpala, MM, 2010. Tour Guide: Teori dan Praktik dalam Pariwisata. Jakarta: Indie Publishing.

 **Plagiarism detected: 0,33%** <https://www.researchgate.net/publication/3277971...> + 2 id: **42**

resources!

Sunaryo. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya. Gava Media. Yogyakarta.

 **Plagiarism detected: 0,19%** <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456...> + 2 id: **43**

resources!

Suyitno. 2005. Pemandu Wisata (Tour Guiding). Yogyakarta

: Graha Ilmu.

 **Plagiarism detected: 0,22%** <https://fpar.unud.ac.id/img/uploads/2014/03/Jurnal...> + 2 id: **44**

resources!

UU RI Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan

 **Plagiarism detected: 0,19%** <https://123dok.com/document/qoom100q-gubern...> + 16 id: **45**

resources!

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Situs: [www.bali-airport.com](http://www.bali-airport.com)

<http://www.kemenparekraf.go.id>

[www.kemenparekraf.go.id](http://www.kemenparekraf.go.id)JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)

Vol. 1, No. 3, Agustus 2021, Hal. xx-xxe-ISSN

: 2721-026XDOI: <https://doi.org/10.36596/jpkmi>

JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)

Vol. 2, No. 3, Agustus 2021, Hal. xx-xxTata Kelola Pramuwisata, (Ely Triasih Rahayu) | 12 Tata

Kelola Pramuwisata, (Ely Triasih Rahayu) | 1